



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 128 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG  
PEDOMAN PELAYANAN RUJUKAN KEGAWATDARURATAN *MATERNAL* DAN  
*NEONATAL* DI KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pedoman pelayanan rujukan kegawatdaruratan *maternal* dan *neonatal* di Kabupaten Tangerang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan *Maternal* Dan *Neonatal* Di Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa sehubungan dengan peningkatan sarana, fasilitas, teknologi, dan partisipasi *stakeholder* dalam pelayanan pelayanan kegawatdaruratan *maternal* dan *neonatal* di Kabupaten Tangerang, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan *Maternal* Dan *Neonatal* Di Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PERNII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 005 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinik Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Di Provinsi Banten;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1201);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514);
16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 58 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Kabupaten Tangerang;
17. Peraturan...

17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
18. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN RUJUKAN KEGAWATDARURATAN *MATERNAL* DAN *NEONATAL* DI KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan *Maternal* Dan *Neonatal* Di Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 56) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang

Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 1 Desember 2015

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 1 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD